



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2025



**PEMERINTAH KOTA CIMAH
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah, pada laporan ini tergambarkan pencapaian indikator program secara menyeluruh serta penjelasan serta alasan keberhasilan maupun ketidakberhasilan atas capaian yang telah ditetapkan. Namun demikian intisari dari laporan ini menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi perangkat daerah khususnya maupun para pihak yang membutuhkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diambil di masa depan.

Laporan ini terwujud karena adanya dukungan dari semua pihak yang telah membantu memberikan data pendukung, masukan dan saran, kritikan yang membangun. Semoga dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi akan menjadi sinergitas yang baik yang mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Cimahi, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pangan dan
Pertanian kota Cimahi


TITA MARIAM, S.Pt, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197007061998032006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	(i)
IKHTISAR EKSEKUTIF	(ii)
DAFTAR ISI	(iii)
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Landasan Hukum	7
1.6 Sistematika LAKIP	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Indikator Kinerja Utama	10
2.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Akuntabilitas Kinerja	22
3.1.1 Capaian Kinerja	22
3.1.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	29
3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat	49
3.4 Prestasi dan Inovasi Dinas Pangan dan Pertanian	51
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, serta penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengelolaan kinerja berbasis hasil (result oriented) melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dalam periode tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tetap berkomitmen mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian dan peternakan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya yang tersedia.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Hal ini tercermin capaian skor PPH Ketersediaan yang terealisasi 92,66 dari target 89,6 atau tercapai 103,4 persen, selanjutnya capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan 83,07 dari target 79, indikator tercapai 105,1 persen, dan tercapainya Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian sebesar 9,53 persen dari target 9,53 persen, tercapai 680,71 persen.

Dari sisi tata kelola anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tingkat serapan anggaran yang optimal serta memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran kinerja. Dari anggaran yang diamanatkan sebesar Rp. 18.507.104.654 bisa terealisasi sebesar Rp. 17.225.382.424, terdapat sisa Rp. 1.281.722.230 atau terdapat efisiensi sebesar 6,93 persen. Dispangtan juga memiliki kontribusi pendapatan daerah yang dihasilkan melalui pelayanan Unit Pelaksana Teknis, yaitu dari UPTD. Pusat

Kesehatan Hewan dan UPTD. Balai Benih Ikan Air Tawar dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 441.185.193 dari target Rp. 387.215.000 atau tercapai sebesar 113,93 persen.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh berbagai faktor, antara lain sinergi perencanaan program dan kegiatan, komitmen dari bidang-bidang di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian, serta dukungan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika kondisi eksternal/kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Sebagai upaya peningkatan kinerja di masa mendatang, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi akan terus melakukan perbaikan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian diharapkan kinerja organisasi dapat terus meningkat dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kota Cimahi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi maka terbentuklah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi, yaitu Bidang Pertanian.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Pangan dan Pertanian mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan penyusunan LKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 adalah merupakan wujud kongkrit pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stake holder) atas kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran Dispangtan Kota Cimahi, yang telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas RPJMD Kota Cimahi tahun 2025-2029 yang tujuannya adalah :

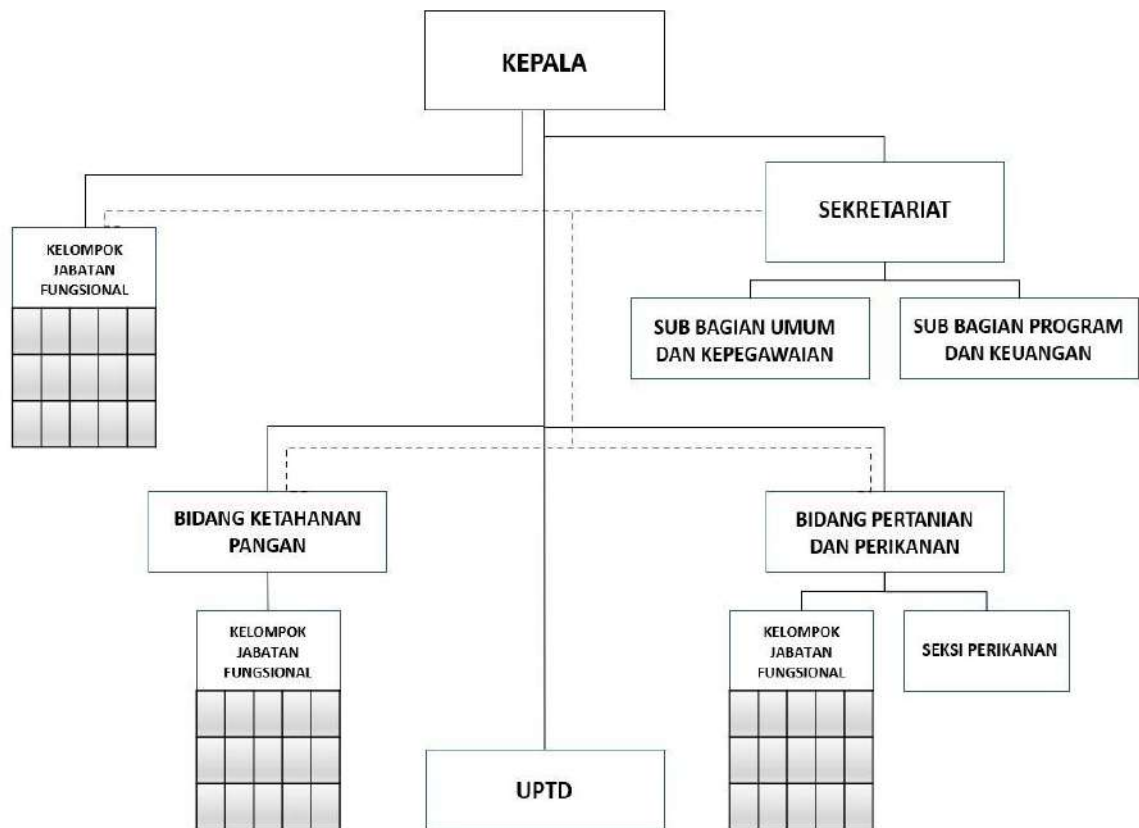
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan transparansi;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan strategis;
4. Mengetahui dan menilai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Perangkat daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota tersebut maka Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan Tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, sedangkan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Perumusan kebijakan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh beberapa Kepala Bidang dan Pejabat Struktural lainnya sebagaimana tergambar pada Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi. Pengidentifikasian isu-isu strategis

juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia;
2. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
3. Masih kurangnya pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah;
4. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
6. Penurunan kualitas lingkungan;
7. Belum optimalnya upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim;
8. Kehidupan masyarakat yang belum aman, tertib dan nyaman;
9. Belum terpadunya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
10. Belum optimalnya implementasi pengarus utamaan gender dalam pembangunan;
11. Melambatnya penurunan kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah, maka isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan 2025 - 2029 adalah:

Adapun permasalahan dan Isu-isu strategis Kota Cimahi yang diemban Dispangtan di lingkup urusan pangan, pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Daya saing sumber daya manusia;
2. Tingkat ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
3. Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah;
4. Tingkat pengangguran terbuka;
5. Tata kelola pemerintahan;
6. Kualitas lingkungan;
7. Kondusifitas kota;
8. Perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya;
9. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Tujuan kota yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025 – 2029 ditetapkan sebagai indikator Kinerja Utama Kota yang harus diintervensi Dispangtan sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

Penetapan kelima indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan

Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen LKIP disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata cara Riviui atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 64);

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

1.6 Sistematika LAKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini memuat gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penulisan dokumen LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini memuat Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini memuat Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah langkah di masa yang akan

dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Dispangtan Kota Cimahi.

LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, foto-foto penghargaan yang diperoleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang efektivitas, efisiensi, dan sasaran kegiatan pembangunan maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan memiliki dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), RPJMD yang selaras dengan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJP Nasional. RPJMD yang didalamnya terdapat penjabaran visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih yang kemudian harus selaras dalam perencanaan perangkat daerah lalu diselaraskan dan menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun yang bersifat transisional dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Periode ini menjadi masa peralihan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Sebagai tahun transisi, penyusunan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 tetap mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD 2023–2026, sekaligus mulai mengakomodasi visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih yang akan dituangkan secara lebih komprehensif dalam RPJMD 2025–2029.

Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 dirancang untuk menjaga kesinambungan pembangunan

(continuity), memastikan stabilitas pelaksanaan program strategis, serta menjadi jembatan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan dokumen RPJMD yang baru. Pendekatan ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan capaian kinerja pembangunan daerah serta meminimalisasi potensi terjadinya kesenjangan program pada masa transisi pemerintahan.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis, dan Berkarakter

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta karakter dan spiritualitas masyarakat, yang menjadi fondasi daya saing daerah.

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif

Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, UMKM, sektor kreatif, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif.

3. Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Mengedepankan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, partisipatif, serta berbasis inovasi dan digitalisasi pelayanan publik.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan

Bertujuan untuk menciptakan kota yang layak huni, sehat, dan resilien terhadap perubahan iklim dan bencana.

5. Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi

Misi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, serta penguatan solidaritas dan ketahanan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan pencapaian visi misi tersebut lebih terarah, efektif dan efisien. Selanjutnya Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan urusan yang diamanatkan kemudian menjabarkan visi misi tersebut dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan demi bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi.

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPD Kota Cimahi 2023 - 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Cimahi Kota Cerdas	1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
			Meningkatnya pengarusutamaan gender
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
			Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
			Pembangunan
			Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga
	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah
			Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
	3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah
			Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
			Meningkatnya kesempatan kerja
	4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
	5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Berkurangnya luasan banjir
			Meningkatnya Kualitas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Lingkungan
			Meningkatnya Kualitas Permukiman
			Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas
			Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi
			Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
		Meningkatkan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Bencana

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026

Sedangkan Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Ringkasan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2025 – 2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
“CIMAHI MANTAP” MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia		IPM
			Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
			Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan	Harapan Lama Sekolah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Produktif	Meningkatn ya kualitas pembangun an ekonomi	kualitas pendidikan	
				PDRB Per kapita
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE
			Menurunnya tingkat pengangguran	TPT
	Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan	Meningkatk nya kualitas lingkungan hidup dan kondusifita s kota		Indeks Perkotaan Berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH
			Meningkatnya stabilitas wilayah	Indeks Penyelenggara an Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Indeks GINI
	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui	Meningkatn ya kesejahteraan masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial
			Meningkatnya kesejahteraan sosial	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Kolaborasi Antar Generasi			Tingkat Kemiskinan

Sumber : RPMJD Kota Cimahi Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mendukung pada pencapaian : (1) Misi ke 1 yaitu : “Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter”, (2) Misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Produktif” dan (3) Misi Ke 5 yaitu : “Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi”, yang diukur dengan sasaran : (1) Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan (4) Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan Jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi selama 5 tahun (2025 – 2029) adalah Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dan meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan dan petani. Indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian di Tahun 2025 merupakan turunan dari indikator sasaran RPJMD 2025 – 2029 Kota Cimahi yang kemudian akan menaungi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. IKU 2025 Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis (IKU) Dispangtan Tahun 2025

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
	Misi 1 : Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter				
1		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	Skor PPH Ketersediaan (skor)	89,6
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan	79
	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Produktif Misi 5 : Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi				
2		Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan dan petani	Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,4

Sumber : Renstra Dispangtan Kota Cimahi 2025 - 2029

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengembian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja

juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan janji Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi kepada Kepala Daerah/Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Untuk lebih menajamkan pencapaian tujuan Kota Cimahi maka sasaran, program beserta indikator target menjadi komponen dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dispangtan Kota Cimahi Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	Skor PPH Ketersediaan (skor)	89,6
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan	79
3	Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,4

Tabel 2.5
Sasaran Program dan Indikator 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.183 P. 67,9
	Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 1.995 P. 57
Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100
Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (persen)	95
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	291
	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.480.000
Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolah perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	2
meningkatkan luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (persentase dokumen persiapan)	30
Terkendalinya wilayah dari penyakit zoonosis	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100
Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	100
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	BB (77,95)
	Nilai IKM Perangkat Daerah	82,1
	Indeks Profesionalitas ASN	80

Adapun dukungan pendanaan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan sasaran program dispangtan Tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Program dan Pendanaan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11.306.160.624,00
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 1.134.990.730,00
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 1.918.059.500,00
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 278.009.900,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 795.257.900,00
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 215.303.200,00
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 2.100.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
8.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp. 1.299.248.400,00
9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp. 9.411.700,00
10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 1.548.562.700,00
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 18.507.104.654,00

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung oleh anggaran murni sebesar Rp. 17.771.448.854,00 kemudian dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah berupa kebijakan terkait dukungan penanganan inflasi daerah, penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, anggaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Rp. 18.507.104.654,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada tahun 2025, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 yang merupakan masa transisi Renstra 2023 – 2026 dan Renstra 2025-2029, dimana pada tahun 2025 IKU Dinas Pangan dan Kota Cimahi sudah menyesuaikan dengan target terbaru sesuai Renstra 2025-2029. Disampingnya yang mengampu 3 urusan yaitu urusan pangan, pertanian dan perikanan, untuk IKU 2024 mengampu 3 (tiga) sasaran strategis dan terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), sedangkan untuk tahun 2025 Disampingnya mengampu metode pengukuran/formulasi yang

digunakan untuk menghitung pencapaian kinerja IKU TA. 2024 dan 2025 bisa terlihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Dispangtan
Tahun 2023 - 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh Tim Reformasi birokrasi Kota Cimahi dengan komponen penilaian terdiri dari unsur : organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dispangtan, Tim RB Kota Cimahi
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	Hasil kalkulasi data aplikasi Harmonisasi analisis nilai PPH (Susenas), hasil inputing data konsumsi masyarakat Cimahi per kapita per minggu selama satu tahun.	Dispangtan, Susenas
	3. Skor PPH Ketersedian	Hasil kalkulasi data aplikasi Harmonisasi analisis nilai PPH (Susenas), hasil inputing data konsumsi masyarakat Cimahi per kapita per minggu selama satu tahun.	Dispangtan, Susenas
	4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	Hasil perhitungan dan publikasi BPS	KCDA, BPS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	Perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan penanaman intervensi rawan pangan.	Dispangtan

Sedangkan untuk periode 2025 – 2029 Indikator Kinerja Utama Dispangtan bisa terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Dispangtan
Tahun 2025 - 2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	Skor PPH Ketersedian	Hasil kalkulasi data aplikasi Harmonisasi analisis nilai PPH (Susenas), hasil inputing data konsumsi masyarakat Cimahi per kapita per minggu selama satu tahun.	Dispangtan, Susenas
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh Tim Reformasi birokrasi Kota Cimahi dengan komponen penilaian terdiri dari unsur : organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dispangtan, Tim RB Kota Cimahi
Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	Hasil perhitungan dan publikasi BPS	KCDA, BPS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)			

3.1.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dikarenakan tahun 2023 merupakan awal tahun pertama periode Renstra Dispangtan 2023-2026 maka akan disajikan perbandingan perubahan indikator yang merupakan penyesuaian indikator turunan dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	Skor PPH Ketersediaan (skor)	89,6	92,66	103,4
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan	79	83,07	105,1
3	Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,4	9,53	680,71

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Capaian (%)
	Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)				

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2025 terdapat 3 sasaran dan masing masing memiliki 1 (satu indikator). Untuk indikator pertama yaitu Skor PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 103,4 persen, indikator ke 2 yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian kinerja sebesar 105,1% dan indikator ketiga yaitu Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian dengan capaian kinerja yang jauh melebihi target sebesar 680,71.

Perbandingan capaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Strategis Dinas Pangan dan Pertanian dengan Capaian Rata-rata Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Capaian 2025	Capaian Rata-rata Provinsi Jawa Barat	Capaian Rata-rata Nasional
1.	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	1. Skor PPH Ketersedian	92,66	95,12	98,92
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	83,07	98,64	-
	Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi	3. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	9,53		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Capaian 2025	Capaian Rata-rata Provinsi Jawa Barat	Capaian Rata-rata Nasional
	Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)				

Adapun capaian kinerja program target dan realisasi kinerja bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAAN KINERJA
Terfasilitasinya penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	77,95	Belum rilis	-
	Nilai IKM Perangkat Daerah	82,1	84,27	102,6
	Indeks Profesionalitas ASN	80	0	0,0
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.350 P. 67,9	E. 2.183 P. 68,2	92,89 100,44
	Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2100 P. 57	E. 1.994 P. 60,7	95,2 97,1

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100	100	100
Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (persen)	95	99	104
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	291	301,5	103,61
	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.480.000	2.485.698	100,23
Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolaha perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	2	2	100
meningkatkan luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (persentase dokumen persiapan)	30	30	100
Terkendalinya wilayah dari penyakit zoonosis	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100	100	100
Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	100	100	100
Meningkatnya Pengetahuan dan	Persentase jumlah	6	15	250

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
keterampilan Petani	kelompok tani yang naik kelas			
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	77,95	-	Data belum rilis
	Nilai IKM Perangkat Daerah	81,5	84,27	102,6
	Indeks Profesionalitas ASN	80	-	Data belum rilis

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 dan sampai dengan tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian dengan periode tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra tampak pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan indikator dan capaian sasaran strategis Dispangtan Tahun 2023 - 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian			% Capaian	Target (2030)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)
				2023	2024	2025			
1	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	Nilai PPH Ketersediaan	2136	2183	2186	-	-	-	-
		Skor PPH Ketersediaan	90,4	89,6	93,3	92,66	103,42	89,8	103,18
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	22,79	77,05	78,74	83,07	105,15	81	102,56
3	Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen	-2,90	1,55	3,80	9,53	287,88	1,6	595,63
		Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian			% Capaian	Target (2030)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)
				2023	2024	2025			
	Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)	kerawanan pangan							

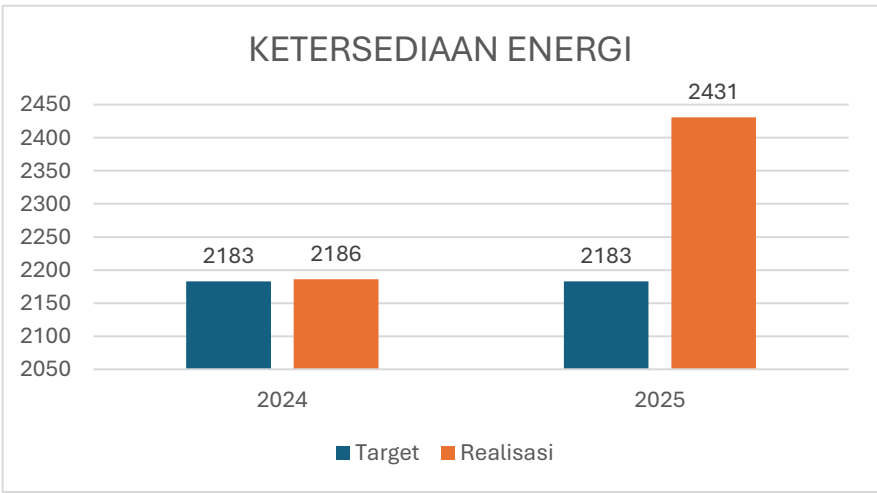
Pada periode perencanaan sebelumnya (2023-2026) Nilai PPH ketersediaan menjadi salah IKU yang menjadi ukuran dalam menggambarkan ketahanan pangan di Kota Cimahi. Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di suatu wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga, dan perorangan secara berkelanjutan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk Kota Cimahi tahun 2023-2025 .

Tabel 3.7
Capaian Perkembangan Pangan per kapita Konsumsi Penduduk dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Kelompok Pangan	Kkal/kap/hari	
	2024	2025
Padi padian	1204	1191
Umbi umbian	38	111
Pangan Hewani	276	353
Minyak dan Lemak	292	476
Buah/biji berminyak	2	2
Kacang kacang	105	54
Gula	65	97
Sayur dan Buah	205	148
Total	2186	2431

Ketersediaan energi tahun 2024-2025 menunjukkan peningkatan jumlah ketersediaan Energi selama tahun 2023-2025 dan pada tahun 2025 sudah melampaui angka idealnya yakni 2.400 kkal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kelompok pangan diantaranya pangan hewani serta minyak dan lemak.

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Ketersediaan Energi di Kota Cimahi dengan Tahun Sebelumnya



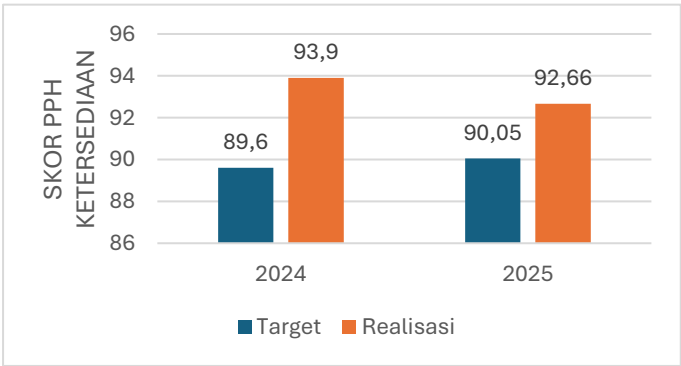
Skor PPH Ketersediaan menggambarkan keragaman ketersediaan pangan dan gizi di suatu wilayah dengan skor ideal sebesar 100. Tingkat keragaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keragaman konsumsi pangan (Atasa dan Nugroho 2021) Perkembangan Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2024-2025 mengalami penurunan sebesar 1,24 poin.

Mengacu pada dokumen transisi Rencana Pembangunan Daerah, ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tanggal dan perseorangan secara berkelanjutan, angka ketersediaan energi menjadi salah satu indikator kinerja dalam pembangunan daerah di bidang pangan.

Tabel 3.8
Capaian Perkembangan Pangan per kapita Konsumsi Penduduk dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Kelompok Pangan	PPH	
	2024	2025
Padi padian	25,0	24,81
Umbi umbian	0,8	2,32
Pangan Hewani	23,0	24,00
Minyak dan Lemak	5,0	5,00
Buah/biji berminyak	0,0	0,03
Kacang kacang	8,7	4,48
Gula	1,4	2,02
Sayur dan Buah	30,00	30,0
Total	93,9	92,66

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Skor PPH Ketersediaan di Kota Cimahi dengan Tahun Sebelumnya



Untuk periode RPJMD 2025 – 2029 Tingkat capain sasaran strategis ke 1 (satu) yaitu **Skor PPH Ketersediaan**, realisasi tercapai 103,42% dari target yang ditentukan. Mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 0,71%, dan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan capaian akhir Renstra di Tahun 2030 sudah tercapai sebesar 103,18%.

Untuk penentuan pencapaian skor PPH ketersediaan memang sedikit kesulitan untuk memperkirakan karena banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya produksi pangan daerah, distribusi akses dan pasokan, kebijakan pemerintah, pola konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat dan faktor lainnya yang tidak bisa menjamin bahwa ditahun berikutnya skor PPH ketersediaan akan meningkat. PPH ketersediaan dipengaruhi oleh struktur produksi pangan daerah yang masih didominasi oleh kelompok padi-padian. Selain itu, keterbatasan produksi pangan hewani dan hortikultura, fluktuasi harga, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah turut memengaruhi komposisi energi pangan. Oleh karena itu, upaya diversifikasi produksi dan penguatan distribusi pangan lokal menjadi faktor kunci dalam peningkatan skor PPH. Tergambar dari infografis sebagai berikut :

Gambar 3.7
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024
(Skor PPH Ketersediaan)



Gambar 3.8
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra
(Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan)



Capaian nilai evaluasi Reformasi Birokrasi menunjukan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Secara umum, capaian nilai RB menggambarkan kemajuan dalam pemenuhan komponen (pengungkit) dan komponen hasil sebagaimana ditetapkan dalam pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi menunjukan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, penguatan akuntabilitas, serta perbaikan proses bisnis dan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang semakin selaras, penerapan manajemen resiko, serta optimalisasi Sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian, untuk tahun 2025 tercapai 105,15 dari target yang telah ditentukan, jika dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,95%, dan jika dilihat dari target akhir sasaran Renstra di tahun 2030 sudah melampaui target

sebesar 102,21% , maka capaian tersebut bisa digambarkan dengan infografis sebagai berikut :

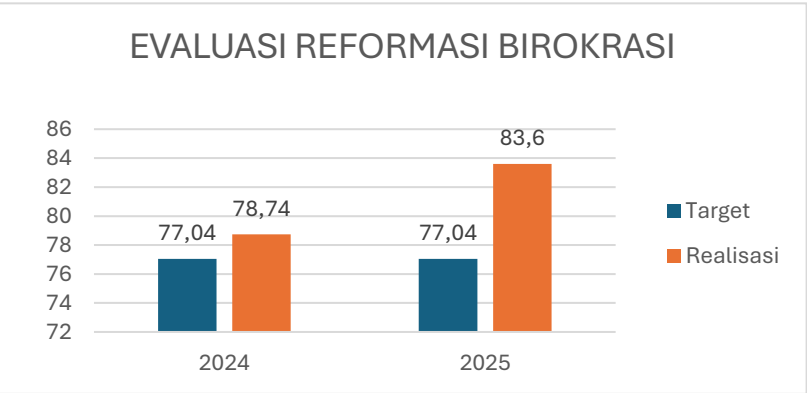


Nilai evaluasi reformasi birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian merupakan hasil evaluasi yang dihasilkan dari penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pangan dan Pertanian yang dinilai dari unsur : organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dinas Pangan dan Pertanian selalu

berupaya untuk meningkatkan berbagai aspek untuk pencapaian reformasi birokrasi lebih baik di masa yang akan datang.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi Dispangtan bisa digambarkan dengan grafik berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Tahun Sebelumnya



Tingkat capain sasaran strategis ke 3 (tiga) indikator ke 3 (tiga) yaitu **Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian** dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan melebihi target yaitu sebesar 9,53 % dengan capaian 680,71% dan dan jika dilihat dari target akhir sasaran Renstra di tahun 2030 sudah melampaui target sebesar 1,6% sudah tercapai 595,63%. Bisa dilihat dari infografis berikut ini :

Gambar 3.11
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024 (Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian)



Gambar 3.12
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian)



Nilai PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan produksi pertanian dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Komponen PDRB sektor pertanian: Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa pertanian dan perburuan. PDRB sektor pertanian dihitung dengan menjumlahkan nilai output bersih yang tercipta di wilayah domestik dalam periode waktu tertentu. Komoditas dihitung pada harga berlaku. Pada tahun berjalan, target pertumbuhan PDRB sektor pertanian ditetapkan sebesar 1,9 persen. Namun demikian, berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, realisasi pertumbuhan sektor pertanian mencapai 9,53 persen, sehingga terjadi capaian yang melampaui target secara signifikan.

Kenaikan tersebut menunjukkan adanya akselerasi kinerja sektor pertanian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

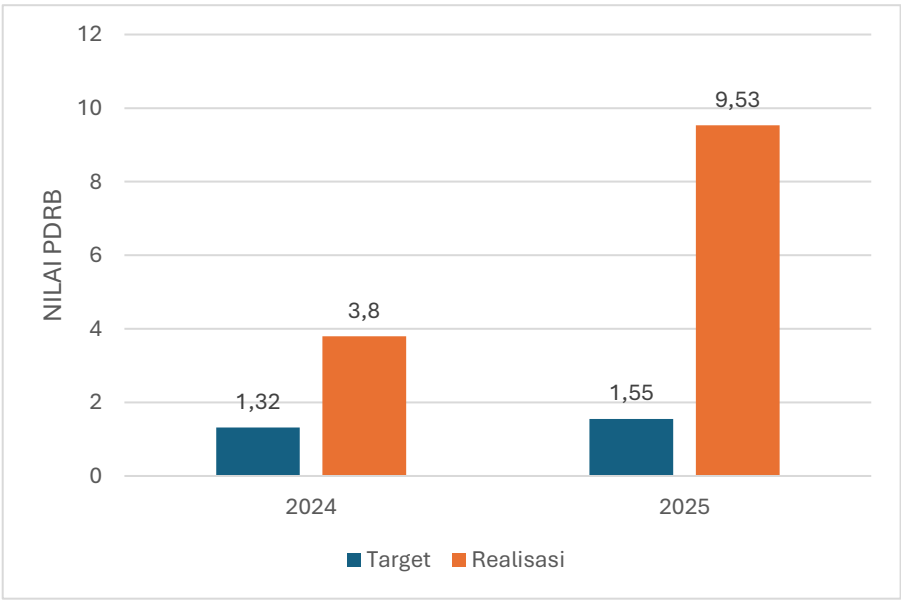
1. **Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan**, baik hortikultura, tanaman pangan, maupun subsektor peternakan.
2. **Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian perkotaan**, termasuk pengembangan urban farming dan pekarangan pangan lestari.
3. **Intervensi program pemerintah daerah**, seperti bantuan sarana produksi, pembinaan kelompok tani, serta penguatan akses pasar.

- 4. **Membaiknya permintaan pasar dan stabilitas harga komoditas**, sehingga memberikan nilai tambah pada output pertanian.
- 5. **Sinergi lintas sektor**, termasuk dukungan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang turut menjaga keberlanjutan usaha tani.

Capaian pertumbuhan sebesar 9,53 persen ini mencerminkan bahwa sektor pertanian memiliki daya tahan (resiliensi) dan kontribusi strategis terhadap perekonomian daerah, meskipun di tengah keterbatasan lahan dan karakteristik wilayah perkotaan seperti di Kota Cimahi. Ke depan, Dinas Pangan dan Pertanian perlu menjaga keberlanjutan tren positif ini melalui penguatan produktivitas, peningkatan kualitas SDM petani, serta pengembangan pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian bisa digambarkan dengan grafik berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Tahun Sebelumnya



Tingkat capain sasaran strategis selanjutnya yaitu **Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan**. Cakupan

PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan yang mendapatkan bantuan digunakan untuk melihat akses pangan bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada pada kondisi rentan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan didukung oleh koordinasi lintas sektor dan penyaluran bantuan yang cukup optimal, dilihat dari hasil Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 bahwa dari 15 Kelurahan di Kota Cimahi termasuk pada daerah tahan pangan dan intervensi untuk ibu hamil/menyusui dan baduta yang terindikasi stunting.

1. Penyaluran Tahun 2024 :

Target beras Fortivit untuk ibu hamil dan menyusui 1.490 orang atau sebanyak 44.700 kg/bulan

Untuk baduta sebanyak 270 orang sebanyak 8.100 Kg/Bulan

Total seluruh 97,5 Ton, Tahap pertama 44,7 (ibu hamil dan menyusui) ditambah 8,1 Ton(Baduta) = 52,8 Ton

Tahap kedua 44,7 Ton (Ibu hamil dan menyusui)

2. Penyaluran Tahun 2025 :

Penyaluran Beras Fortivit tahun 2025 sebanyak 54,9 Ton untuk 915 ibu hamil/menyusui (tersebar di 15 kelurahan) data berasal dari Dinas Kesehatan dalam hal ini di Pukesmas (KIA) Koordinator Posyandu (para Bidan setiap Puskesmas), selama 6 bulan terbagi menjadi 2 Tahap

Tahap 1 14 Oktober 2025 sebanyak 27,45 Ton (untuk 3 Bulan , 1 orang 10 Kg/bulan)

Tahap 2 4 November 2025 sebanyak 27,45 Ton (untuk 3 bulan, 1 orang 10 Kg/bulan)

pemberian makanan tambahan untuk Baduta berupa susu dan telur ayam ras sebanyak 222 anak (2 kelurahan) data update dari Dinkes

Susu 666 Box (1 anak 1 box/bulan selama 3 bulan)

Telur 1332 Kg (1 anak 2 Kg/bulan selama 3 bulan)

Perbandingan angka penyaluran bantuan kerawanan pangan Tahun 2024 dan 2025 bisa dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Tahun 2025 dengan Target RPD dan Renstra 2025 - 2029

Penyaluran	2024		2025	
	Kg	orang	Kg	orang
Beras CPPD (untuk masyarakat rawan pangan di 8 Kelurahan)				
Beras Fotivit (Ibu hamil/menyusui)	89.400	1490	54,900	915
Beras Fortivit (Baduta)	8100	270		
Telur (Baduta)	1620 Kg	270	1332 Kg	222
Susu (Baduta)	810 Box		666 Box	
Jumlah		1760		1137

Penyaluran bantuan penanganan kerawanan pangan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi telah terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Proses penyaluran dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi data rumah tangga rentan pangan, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, distribusi dilakukan secara terkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, guna memastikan kelancaran serta transparansi penyaluran. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas bantuan serta ketepatan waktu distribusi.

Dengan tersalurkannya bantuan kerawanan pangan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat rentan, menjaga stabilitas akses pangan, serta mendukung upaya penguatan ketahanan pangan di Kota Cimahi.

Tabel 3.10
Realisasi Tahun 2025 dengan Target RPD dan Renstra 2025 - 2029

INDIKATOR	TARGET RPJMD 2025	TARGET RENSTRA 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.350 P. 67,9	E. 2.350 P. 67,9	E. 2.186 P. 75,7	93 111,5
Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.095 P. 62,5	E. 2100 P. 57	E. 1.994 P. 60,7	95,2 97,1
Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	100	100	100	100
Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (persen)	70	70	98	140
Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	290	290	290,36	100,12
Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.375.000	2.375.000	2.479.098	100,37
Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	2	2	2	100
Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (persentase dokumen persiapan)	30	30	30	100
Prosentase Pengendalian	100	100	100	100

INDIKATOR	TARGET RPJMD 2025	TARGET RENSTRA 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)				
Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	100	100	140	140
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	6	6	15	250
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	BB	BB	BB	100
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,5	81,5	82,4	101,1
Indeks Profesionalitas ASN	46	68,5	80	116,8

Adapun realisasi anggaran disandingkan dengan capaian sasaran program Dinas Pangan dan Pertanian digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran disandingkan dengan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %	Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Selisih	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Rata-rata ketersediaan Energi (kkal/Kap/hari)	2350	2183	92,89	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.134.990.730	1.032.992.470	101.998.260	91
	Rata-rata ketersediaan Protein (gr/kap/hari)	67,9	68,2	100,44					
	Rata-rata konsumsi Energi	2100	1995	95					
	Rata-rata Protein (gr/kap/hari)	57	57	100					
Tertanganinya kasus kerawanan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.918.059.500	1.445.204.154	472.855.346	75
Terkendalnya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	95	95	100	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	278.009.900	255.270.790	22.739.110	92

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran disandingkan dengan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %	Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Selisih	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi ikan Konsumsi (Ton)	291	291	100	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	795.257.900	758.806.628	36.451.272	95
	Produksi Ikan Hias (ekor)	2.480.000	2.480.000	100					
Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolahan perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan	2	2	100	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	215.303.200	214.927.386	375.814	100
Meningkatnya luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan(%)	30	30	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.100.000	2.100.000	0	100
Terkendalinya wilayah dari	Persentase Pengendalian kesehatan	100	100	100	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN	1.299.248.400	1.109.478.308	189.770.092	85

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran disandingkan dengan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %	Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Selisih	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
penyakit zoonosis	hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Jumlah Kelurahan yang dilayani)				HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	100	100	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	9.411.700	8.399.905	1.011.795	89
Meningkatnya pembinaan penyuluhan bidang pertanian	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76	11,76	100	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.548.562.700	1.501.922.379	46.640.321	97

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran disandingkan dengan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %	Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Selisih	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,90	-	100,06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.306.160.624	10.896.280.404	409.880.220	96
	Nilai IKM Perangkat Daerah	82	-	100,12					
	Indeks Profesionalitas ASN	68,50	80,0	116,78					
					REALISASI	18.507.104.654	17.225.382.424	1.281.722.230	93,07

3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator-indikator program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian tentu sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya kemitraan/kolaborasi (crosscutting).

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi per 30 Desember 2025 adalah sebanyak 78 orang, yang terdiri dari ASN dan PPPK sebanyak 51 orang, tenaga THL 26 orang dan THL Provinsi sebanyak 1 orang.

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan tantangan di dalam perangkat daerah. Krisis pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan tingkat pekerjaan yang semakin menumpuk harus bisa membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Efisiensi SDM, tidak hanya mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun, efisiensi SDM juga tentang pencapaian seluruh aspek tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah. Dapat diasumsikan jika produktifitas sumber daya manusia pada suatu perangkat daerah tinggi, maka efisiensinya juga akan tinggi. Dapat dihitung juga dengan membandingkan antara input dan output. Namun, selain SDM banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas. Diantaranya yaitu : waktu dan biaya serta kondisi lingkungan.

Kinerja perangkat daerah tentu saja harus didukung oleh ASN yang berkualitas, kompeten, berdisiplin dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Maka dibutuhkan **reward** dan **Punishment** yang merupakan salah satu strategi dalam peningkatan kinerja ASN. **Reward** merupakan bentuk pengakuan atau penghargaan kepada karyawan sebagai respons atas pencapaian atau perilaku sesuai ketentuan perangkat

daerah. Adanya reward bertujuan untuk meningkatkan motivasi karyawan, meningkatkan kinerja, mempertahankan karyawan yang berprestasi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Sementara itu, punishment merupakan hukuman atau sanksi kepada karyawan sebagai respons atas perilaku yang tidak sesuai atau pelanggaran aturan. **Punishment** bertujuan untuk mengurangi atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan, meningkatkan disiplin, dan memastikan karyawan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi.

Selama tahun 2023 sampai dengan 2025 terdapat bentuk penerapan reward & punishment di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yaitu untuk ASN berprestasi diberikan penghargaan selain dari Kota Cimahi juga dari Dinas Pangan dan Pertanian atas nama : drh. Irfan Fadzar Ramadhan (Asn berprestasi tahun 2023), drh. M. Faiz Labib (Asn berprestasi tahun 2024), Ati Listianawati, S.Pt, M.A.P (ASN berprestasi tahun 2025) dan drh. RR. Retno Wulan (ASN berprestasi Tahun 2025) . Adapun punishment juga diberlakukan untuk ASN yang melanggar aturan yaitu a.n Rimba Limba Limbangani, A.Md. yang sudah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja. Peringatan tersebut tertuang dalam SK Kepala Bidang Ketahanan Pangan Nomor : 862.1/Kep. 375-Dispangtan/2024.

2. Sumber Daya Anggaran dan Pembiayaan

Dukungan pendanaan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. 18.128.663.854 lalu pada bulan Oktober 2024 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran Rp. 18.894.319.654, Ringkasan anggaran bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Ringkasan anggaran Dispangtan Murni dan Perubahan Tahun 2025

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 357.215.000,00	Rp. 387.215.000,00
Retribusi Daerah	Rp. 357.215.000,00	Rp. 387.215.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 357.215.000,00	Rp. 387.215.000,00
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	Rp17.248.320.854,00	Rp17.553.242.954,00
Belanja Pegawai	Rp.8.720.819.624,00	Rp.8.623.170.274,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.8.527.501.230,00	Rp.8.930.072.680,00
BELANJA MODAL	Rp. 523.128.000,00	Rp. 953.861.700,00
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 438.688.000,00	Rp. 653.011.700,00
Belanja modal gedung dan bangunan	Rp. 49.440.000,00	Rp. 265.850.000,00
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 18.128.663.854	Rp. 18.894.319.654

Kinerja Pemerintah Kota Cimahi selama Tahun 2025 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 18.507.104.654,00. Pada akhir Tahun 2025, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 17.225.382.424,00 atau sebesar 93,07 %. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dab sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebesar 92,91% Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran pertama, yaitu Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah 82,06 %.

Analisis realisasi dan efisiensi Penggunaan Sumber daya dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja Sasaran Strategis pada Tabel berikut :

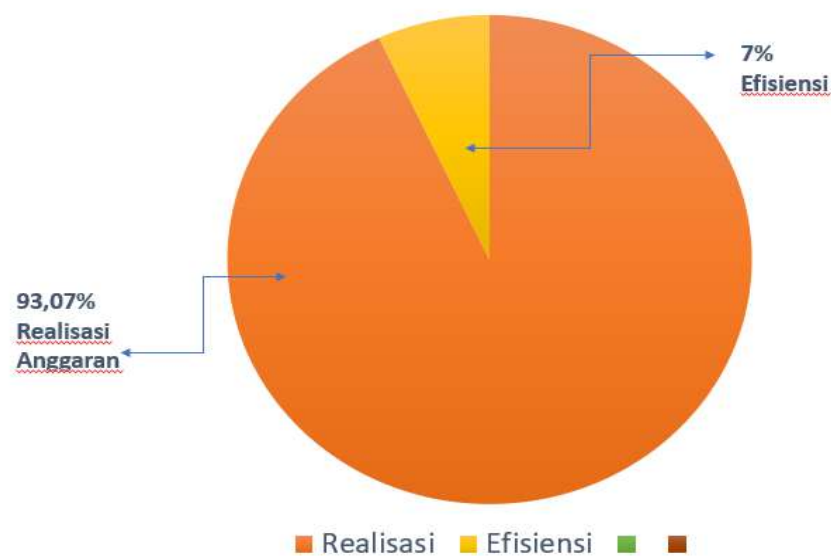
Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Urusan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	103,4	82,06	17,94
2	Meningkatnya tatakelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	105,15	93,11	6,89
3	Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen)	680,71	92,9	7,1

Efisiensi anggaran pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tercermin dari optimalnya capaian kinerja program dan kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran yang proporsional dan terkendali. Realisasi anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang melampaui atau sesuai target, sehingga menunjukkan adanya penggunaan sumber daya yang efektif dan tepat sasaran.

Analisis efisiensi didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing masing sasaran. Dari 3 sasaran, semua capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 6,93 % atau senilai Rp. 1.281.722.230,00. Perbandingan realisasi dan efisiensi bisa dilihat pada grafik berikut :

grafik 3.1
Perbandingan realisasi dan efisiensi anggaran Tahun 2025



Selain penggunaan APBD Kota Cimahi, Dinas Pangan dan Pertanian memiliki sumber pendapatan yang dikelola umumnya berasal dari retribusi pelayanan kesehatan hewan dari UPTD. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan dari budidaya pembenihan dari UPTD. Balai Benih Ikan Air Tawar. Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penertiban administrasi pemungutan retribusi, serta penguatan pengawasan terhadap objek dan subjek retribusi. Berikut ini disampaikan capaian pendapatan Dispangtan dari kedua UPTD tersebut :

Tabel 3.14
Realisasi pendapatan UPTD. Puskeswan dan BBIAT Tahun 2025

NO	UPTD	TARGET	REALISASI	%
1	PUSKESWAN	333.215.000	382.810.000	114
2	BBIAT	54.000.000	58.375.193	108,1
	JUMLAH	387.215.000	441.185.193	113,93

Secara umum, kenaikan pendapatan kedua UPT tersebut menunjukkan bahwa pelayanan teknis yang profesional, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sekaligus mempertegas peran strategis Dinas Pangan dan Pertanian dalam mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam rangka pencapaian indikator strategis adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendorong

- Pangan merupakan kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi;
- Kondisi ekonomi, politik, sosial, keamanan yang baik akan mendukung ketahanan pangan;
- Jumlah angkatan kerja yang cukup merupakan modal dasar pengembangan pertanian;
- Indonesia berada di zona iklim tropis ekuatorial yang ditandai dengan suhu udara tahunan yang tinggi;
- Perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan benih berkualitas tinggi dan teknologi mendukung ekonomi agrikultur;
- Hasil pertanian perikanan dan peternakan yang berkualitas dapat mendukung pertanian modern dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

- Regulasi pengadaan barang dan jasa;
- Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun dan antar wilayah;
- Semakin menurunnya luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan dan daya dukung alam;
- Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat;

- Konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- Kurangnya infrastruktur penyimpanan cadangan pangan daerah;
- Petani dan pengolah pangan masih kekurangan pengetahuan tentang teknik pasca panen yang baik;
- Regulasi klaim/pengambilan pupuk bersubsidi;
- Penerapan teknologi pasca panen yang masih rendah;
- Cuaca ekstrem, kekeringan, dan banjir melanda berbagai daerah;
- Tantangan sumber daya air;
- Kondisi ekonomi, sosial, ekonomi yang tidak begitu baik maka akan berdampak ke sektor lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kinerja yang baik tentu saja harus didukung oleh sarana prasarana penunjang kinerja yang baik. Sarana dan prasarana di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi beserta kondisinya bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Kondisi Sarana prasarana Dispangtan Tahun 2024

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
1.	Alat Berat					
	1.	Pompa Air	2 Unit	Baik		
	2.	Pompa Airasil	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
	3.	Pompa Lain-lain	4 Unit	Baik		
	4.	Portable Water Pump	1 Unit	Baik		
	5.	Tractor Lain-lain	1 Unit	Baik		
	6.	Transportable Water Pump	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
2.	Alat Angkutan					
	1	Roda 4	4 Unit	Baik	4 Unit	
	2	Roda 3	2 Unit	2 Rusak Berat		
	3	Roda 2	5 Unit	Baik	6 Unit	
3.	Alat- alat Kantor dan Rumah Tangga :					
	1	AC	13 Unit	1 Unit Rusak	18 Unit	
	2	Air Blower	10 Unit	Baik		
	3	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	4	Alat Kedokteran Poliklinik Lain-lain	17 Unit	Baik		
	5	Alat Kedokteran Umum Lain Lain	15 Unit	Baik		
	6	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1 Unit	Baik		
	7	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	3 Unit	Baik		
	8	Alat Laboratorium Umum Lain-lain	3 Unit	Baik		
	9	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2 Unit	Baik		
	10	Alat Pasca Panen Lain-lain	4 Unit	Baik		
	11	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain)	79 Unit	Baik		
	12	Alat Pemadam/Portable	1 Unit	Baik		
	13	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	30 Unit	Baik		
	14	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	22 Unit	Baik		
	15	Alat Pengering (Dryer)	1 Unit	Baik		
	17	Alat Pengukur Curah Hujan	1 Unit	Rusak		
	18	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	4 Unit	Baik		
	19	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	3 Unit	Baik		
	20	Alat Perontokan (Thresher Pedal)	5 Unit	Baik		
	21	Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	1 Unit	Baik		
	22	Alat Processing Lain-lain	1 Unit	Baik		
	23	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	9 unit	Baik		
	24	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 Unit	Baik		
	25	Alat Timbangan Lain-lain	14 Unit	Baik		
	26	Alat Ukur	1 Unit	Baik		
	27	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	3 Unit	Baik		
	28	Alat-alat Peternakan Lain-lain	12 Unit	Baik		
	29	Angkutan Barang Lain-lain	2 Unit	2 Unit Rusak	1 Unit	
	30	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54 Unit	Baik		
	31	Bak Aquarium	40 Unit	Baik		
	32	Bak Fiberglass	27 Unit	Baik		
	33	Bak Pemeliharaan Sementara	18 Unit	Baik		
	34	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1 Unit	Baik		
	35	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1 Unit	Baik		
	36	Brandkas	1 Unit	Baik		
	37	CCTV dan Perlengkapannya	2 Tempat	Baik		
	39	Centrifuge	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
	40	Coffee Maker	1 unit	Baik		
	41	Container	1 Unit	1 Unit Rusak		
	42	CPU (Peralatan Personal Komputer)	29 Unit	15 Unit Rusak	38 Unit	

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	43	Desicator	2 Unit	Baik		
	44	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	1 Unit Rusak		
	45	Dispenser	3 Unit	Baik		
	46	Display (Rak)	2 Unit	Baik		
	47	Electric Generating Set Lain-lain	1 Unit	Baik		
	48	Elemeyer Glass	4 Unit	Baik		
	49	Facsimile	2 Unit	2 Unit Rusak	1 Unit	
	50	Filing Cabinet Besi	21 Unit	4 Unit Rusak		
	51	Filter	4 Unit	Baik		
	52	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	1 unit	1 Unit Rusak		
	53	Freezer 70 Derajat C Centrifuge With Accesories	1 unit	1 Unit Rusak		
	54	Gas Regulator	4 Unit	Baik		
	55	Grinder	1 unit	Baik		
	56	Gunting Lurus	1 unit	Baik		
	57	Handy Cam	1 unit	Baik		
	58	Handy Talky (HT)	8 Unit	Baik		
	59	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Turbin (Fuel Jet)	1 unit	Baik		
	62	Kipas Angin	1 Unit	1 Unit Rusak		
	63	Kitchen Set	2 Unit	Baik		
	64	Kursi Biasa	9 Unit	Baik		
	65	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik		
	66	Kursi Kayu	50 Unit	Baik		
	67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	Baik		
	68	Kursi Lipat	3 unit	Baik		
	69	Kursi Rapat	136 Unit	Baik		
	70	Kursi Tamu	2 Unit	2 Unit Rusak	3 Set	
	71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik		
	73	Lap Top/ Note Book	11 Unit	6 Unit Rusak	15 Unit	
	74	Lemari Arsip (Besi & Kayu)	18 Unit	4 Unit Rusak		
	77	Lemari Es	9 Unit	3 Unit Rusak		
	80	Lemari Pakaian	3 unit	Baik		
	82	Magnetic Ferofilter	1 unit	Baik		
	83	Mayor Operasi Set	1 unit	Baik		
	84	Meja Biro	21 Unit	5 Unit Rusak		
	85	Meja Kerja Besi/Metal	5 Unit	Baik		
	86	Meja Kerja Kayu	7 Unit	Baik		
	87	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit	Baik		
	88	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Baik		
	89	Meja Makan Kayu	2 Unit	Baik		
	90	Meja Periksa Pasien	3 Unit	Baik		
	91	Meja Rapat	7 Unit	Baik		
	92	Meja Tambahan	2 Unit	Baik		
	93	Mesin Absensi	2 Unit	Baik		
	94	Mesin Bor Tangan	1 Unit	Baik		
	96	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	97	Mesin Las Listrik	1 Unit	Baik		
	98	Mesin Pemotong Rumput	6 Unit	2 Unit Rusak		
	99	Meubelair Lain-lain	1 Unit	Baik		
	100	Microscope	5 Unit	Baik		
	102	Minor Surgeri Set	3 Unit	Baik		
	103	Mixer	1 Unit	Baik		
	105	Mobile Operating Lamp	2 Unit	Baik		
	106	Nebulizer	1 Unit	1 Unit Rusak	3 Unit	
	107	Needle Holder	2 Unit	Baik		
	109	Operating Table Bedah	4 Unit	Baik		
	110	Oven	1 Unit	Baik		
	111	Overhead Projector	7 Unit	Baik		
	113	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	10 Unit	Baik		
	116	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1 Unit	Baik		
	119	Perkakas Standar Lain-lain	1 Unit	Baik		
	121	Pesawat Telephone	3 Unit	3 Unit Rusak	1 Unit	
	122	PH Meter	2 Unit	Baik		
	123	Pick Up	1 Unit	Baik		Accessories Pick Up
	128	Printer (Peralatan Mini Komputer)	25 Unit	17 Unit Rusak	35 Unit	
	129	Rak Besi	3 Unit	Baik		
	130	Rak Kayu	1 Unit	Baik		
	131	Rak Pengering	1 Unit	Baik		
	132	Rak Peralatan	1 Unit	Baik		
	133	Refrigerator	1 Unit	1 Unit Rusak		
	134	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1 Unit	Baik		
	135	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	Baik	2 Unit	
	138	Slicer	1 Unit	Baik		
	139	Slide Projector (Lapangan)	1 Unit	Baik		
	140	Sofa	5 unit	2 Unit Rusak		
	141	Sound System	2 unit	Baik		
	142	Stereo Generator Fm	1 Unit	1 Unit Rusak		
	143	Sterilisator	3 Unit	1 Unit Rusak		
	144	Tabung Gas	4 Unit	Baik		
	145	Tabung Oksigen	8 Unit	Baik		
	146	Tangga Aluminium	1 Unit	1 Unit Rusak	3 Unit	
	147	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Unit	2 Unit Rusak		
	148	Televisi	9 Unit	2 Unit Rusak		
	149	Tempat Tidur Kayu	3 Unit	Baik		
	150	Termos A.J	5 Unit	5 Unit Rusak		
	152	Timbangan	2 Unit	2 Unit Rusak		
	153	Timbangan Bayi	3 Unit	1 Unit Rusak	6 Unit	
	156	Tripod Camera	3 Unit	Baik		
	157	Tustel	2 Unit	Baik		
	158	USG	1 Unit	1 Unit Rusak	1 Unit	
	159	Vacum Pump	30 Unit	30 Unit Rusak		
	160	Water Filter	1 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	161	Water Quality Analyzer System (Tester Kit)	3 Unit	Baik		
	163	White Board	9 Unit	Baik		

4. Sumber Daya Kemitraan/Kolaborasi (Cross cutting)

Dalam rangka pencapaian program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Dalam mensukseskan program kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari konsep pentahelix yang merupakan gabungan dari 5 unsur. Unsur-unsur yang saling berkesinambungan dalam pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan. Kolaborasi yang telah dilaksanakan dari unsur Pemerintah, Akademisi, Komunitas bidang pertanian, perikanan dan peternakan, pengusaha dan unsur lainnya. Unsur-unsur kolaborasi yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian bisa digambarkan pada tabel (Cross Cutting) berikut ini :

Tabel 3.10
Kolaborasi/crosscutting Dinas Pangan dan Pertanian

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Cross Cutting	
			Antar Bidang	Instansi Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	Disdagkoperin, UPT. Pasar, Bulog, KWT, Pembudidaya, BPBD, DP3AP2KBA, Dishub, Satpol PP, Admirek, Bulog dan PT. Pos, Bapanas
		Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	Sekretariat	Bappelitbangda, Dinkes, Dinsos, Disdcukcapil, DP3AP2KBA, DPKP Prov Jabar

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Cross Cutting	
			Antar Bidang	Instansi Lainnya
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terkendalnya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	Disdagkoperin, UPT. Pasar
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	Sekretariat	Pembudidaya ikan, Fakultas Perikanan dan Kelautan UNPAD, Pokdakan Sebandung Raya, Balai Riset Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jabar, importir perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Inovasi Nasional
		Jumlah produksi ikan hias (ekor)	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolaha perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	Sekretariat dan bidang ketahanan pangan	Dinas Kelautan, dan Perikanan Prov Jabar, DP3AP2KBA dan Para UMKM Pengolah Ikan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	meningkatnya luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	Sekretariat	Bidang hukum setda, Unpad, dpmptsp, BPN, Kementerian Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalnya wilayah dari penyakit zoonosis	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	Sekretariat	Dinkes, Balai veteriner Subang, Bappenda, Bappelitbangda, Syncore BLUD, RS Hewan cikole, dkpp, fak kedokteran hewan unpad, SMK pangalengan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	Sekretariat	DPMPTSP, para pelaku usaha pertanian, perikanan dan peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Sekretariat dan bidang ketahanan pangan	Petani, penyuluh pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar, Kementerian Pertanian
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	Sekretariat dan bidang pertanian dan perikanan	Bapanas, Dinkes, Dinsos, Admirek, Satpol PP, Dishub, BPBD,

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Cross Cutting	
			Antar Bidang	Instansi Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	Bappelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Organisasi, Pemerintahan, Adbang, Bappenda, Bagian Hukum, Diskominfo
		Nilai IKM Perangkat Daerah (nilai)		
		Indeks Profesionalitas ASN (nilai)		

3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan elemen penting yang berkontribusi terhadap tercapainya target kinerja organisasi. Dukungan kebijakan pemerintah daerah, komitmen pimpinan dan aparatur, serta sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap program berjalan secara efektif dan terarah. Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan koordinasi lintas sektor yang solid turut memperkuat keberhasilan implementasi kegiatan di bidang pangan dan pertanian. Berikut beberapa hal yang menjadi faktor pendorong program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antar bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian;
2. Adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB dalam pelaksanaan sosialisasi B2SA Go To School, Gemarikan dan Sekolah Berkebun;
3. Untuk pelaksanaan bazar pangan murah adanya koordinasi yang baik dengan pihak pihak terkait (kelurahan dan RW) antusias dari masyarakat;
4. Adanya Surat Keputusan Bapanas No 3 Tahun 2025 tentang batas minimum penyediaan beras CPPD Tahun 2025, untuk Cimahi sebesar 64,43 Ton;
5. Adanya pelaku usaha yang mendaftar PSAT dan PDUK;

6. Penambahan Lokus Pengujian Keamanan pangan segar (SPPG);
7. Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten Kota dan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26159/Pk.430/F/03/2025 Hal pembentukan Kader pemantauan dan Tindakan Cepat Kejadian Zoonosis (Kader Zoonosis) tanggal 26 maret 2025.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Pangan dan Pertanian juga masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja diantaranya :

1. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya menunggu anggaran perubahan;
2. Pelaksanaan Pengadaan beras CPPD menunggu surat ijin prinsip, penjualan ke instansi harus ditentukan dari Bulog Pusat dalam bentuk surat keputusan;
3. Keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa bidang teknis serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.
4. Dinamika regulasi dan kebijakan yang memerlukan penyesuaian dalam waktu relatif singkat turut menjadi faktor yang memerlukan perhatian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai faktor penghambat yang dihadapi, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pencapaian target kinerja tetap optimal. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan perencanaan berbasis data dan evaluasi capaian kinerja secara berkala guna meningkatkan ketepatan sasaran program dan kegiatan.

Selain itu, dilakukan optimalisasi dan penajaman prioritas anggaran agar lebih fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ketahanan pangan dan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan.

Penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait terutama bagian pengadaan barang dan jasa dan BULOG untuk pengadaan beras cadangan pangan dan beras fortivit. Berbagai upaya dilakukan untuk efektivitas pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dilakukan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada periode berikutnya.

3.4. Prestasi dan Inovasi Dinas Pangan dan Pertanian

Perbaikan dalam hal pelayanan perangkat daerah adalah hal yang harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan terus membangun inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan dan juga agar bisa memberikan solusi dari masalah-masalah yang di tahun sebelumnya, meningkatkan produktivitas juga meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun **inovasi** yang sudah dirintis Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Gertam Parti : Gerakan Tanam Pangan Holtikultura (Seksi Pertanian);
2. Laskar Sehati : Kelas Ketahanan Pangan Anak dan Remaja Sekolah Hijau Tercukupi Gizi (Seksi Pertanian);
3. Pempek Keliling : Pelayanan Konsultasi Perikanan Keliling;
4. Pojok Ikan Hias (Seksi Perikanan);
5. Siterang : Vaksinasi On the Spot Penular Rabies dan Flu Burung (Seksi Peternakan);
6. Peterpan : Pengobatan Ternak Panggilan (Seksi Peternakan);
7. GPM Pangsi : Gerakan Pangan Murah – Pangan Pokok dan Segar Cimahi (Bidang Ketahanan Pangan);

8. PMT Suster Larasati : Pemberian Makanan Tambahan Susu Steril dan Telur Ayam Ras untuk Anak Stunting (Bidang Ketahanan Pangan);
9. Apach Sich : Agen Pengendali Hayati Sahabat Petani Cimahi (Bidang Ketahanan Pangan);
10. Pangan Singkong : Penganekaragaman Pangan Berbahan Baku Singkong (Bidang Ketahanan Pangan);
11. KWT Peduli (Bidang Ketahanan Pangan);
12. Wisben : Wisata Perbenihan Ikan (UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar).

Inovasi-inovasi tersebut tercantum dalam SK Tim Inovasi Dispangtan Nomor : 050/Kep. 451-Dispangtan/2023.

Adapun prestasi Dinas Pangan dan Pertanian yang telah dicapai pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
1	7 Maret 2023	Peringkat Kedua Terbaik Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan & Kesehatan Hewan di Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Bandung
2	17 Agustus 2023	Penghargaan Abdibaktitani Tingkat Nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk UPTD Puskeswan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi UTAMA	UPTD	Tingkat Nasional	1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Jakarta
3	1 September 2023	Juara 1 Lomba Olahan Serba Ikan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Bandung

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
4	2 September 2023	Predikat Khusus Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2023 Pada Kompetisi Chima Motekar Award Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
5	2 September 2023	Juara 2 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi SIMANTRI an. Mita Mustikasari, SPT, MM	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	2	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
6	2 September 2023	Juara 3 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi BIOGRO Siti Rakhmah Tentrisui Pakki, ST, MT,	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	3	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Kota Cimahi
7	19 Desember 2023	Juara 1 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Sukabumi
8	20 Desember 2023	Piagam Penghargaan Wali Kota Cimahi kepada Atas Komitmen dan Konsistensi dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	-	Wali Kota Cimahi	Kota Cimahi
9	22 Des 2023	UPTD Puskesmas Juara 1 Puskewan Terbaik Jawa Barat Tahun 2023	UPTD	Jawa Barat	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Bandung

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
						Provinsi Jawa Barat	
10	22 Des 2023	Dinas Pangan dan Pertanian Juara 2 Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Bandung
11	22 Des 2023	Juara 3 Pelapor ISHIKNAS Terbaik Jawa Barat An. Drh Aldis	Perangkat Daerah	Jawa Barat	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Bandung
12	1 Maret 2024	Juara 2 Kompetisi Inovasi Cimahi Innovation Hackathon Days 2024 An. Drh. Muhamad Faiz Labib	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	2	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
13	15 Mei 2024	Juara 2 Lomba Memasak Menu Pangan Lokal Mewakili Provinsi Jawa Barat dalam rangka Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 52 dan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2024	Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Nasional	2	Badan Pangan Nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Solo
14	23 Agustus 2024	Juara Favorit 2 Sayembara Memasak Antar Pimpinan Daerah (Samara) Tahun 2024	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat	Bandung
15	27 Agustus 2024	Organisasi Perangkat Daerah Terbaik Ke-3 dalam Pengelolaan Statistik Sektoral	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	3	Badan Pusat Statistik Kota Cimahi	Cimahi

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
		Kota Cimahi Tahun 2024, PIC. Erni Nurlaelawati, S.IP					
16	16 Nov 2024	Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Nasional	A	Badan Pangan Nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Bandung
17	16 Nov 2024	Juara 2 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Barat	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Provinsi Jawa Barat	Bandung
18	1 Oktober 2024	Juara 1 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi SITERANG an. Drh. Retno Wulan dan Drh. Muhammad Faiz Labib	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
19.	1 Oktober 2024	Juara 3 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi LASKAR SEHATI an. Mita Mustikasari SPt, MM dan Siti Rahkmah Tenrisui Pakki, ST, MT	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	3	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
20	1 Oktober 2024	Juara 1 Chima Motekar Award Kelompok Peserta UPTD dengan Judul DIGIT SI EMPUS an. Drh Irfan Fajar Ramadhan dan Ade Ariesta Putri	Pusat Kesehatan Masyarakat/ Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah/Kelurahan	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
21.	1 Oktober 2024	Predikat Khusus Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2024	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	Cimahi

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
		Pada Kompetisi Chima Motekar Award Tahun 2024				Pengembangan Daerah Kota Cimahi	
22	Juni 2025	Juara III Lomba Cerdas Cermat Tingkat Peragkat Daerah pada acara HUT Kota Cimahi an. drh. M. Faiz Labib, Nia Fatmawati H, S.Kom, M.A.P dan Erni Nurlaelawati, S.IP	Tingkat Perangkat Daerah	Kota Cimahi	3	Bagian Pemerintahan Setda Kota Cimahi	Cimahi
23.	1 Desember 2025	Juara 3 ASN Teladan an. Ati Listianawati, S.Pt, M.A.P	Struktural	Kota Cimahi	3	BKPSDM Kota Cimahi	Cimahi
24.	1 Desember 2025	Juara 3 ASN Teladan an. drh. RR. Retno Wulan	Fungsional	Kota Cimahi	3	BKPSDM Kota Cimahi	Cimahi
25.	3 Desember 2025	Juara 3 Chima Motekar Award Kelompok Peserta UPTD dengan Judul Inovasi : Yuk! Wisata Perbenihan Ikan (Wisben), an. Ati Listianawati, S.PT., M.A.P, Mula Febianto, S.T., M.Si, Dea Rizma Julianti, S.Pi, Tisa Rahmaliani, A.Md.Pi.	Pusat Kesehatan Masyarakat/ Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah/Kelurahan	Kota Cimahi	3	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bagian penutup dokumen LAKIP Dispangtan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dispangtan Kota Cimahi yang mempunyai 3 (tiga) indikator sasaran strategis dan 14 (empat belas) sasaran program hampir semua indikator-indikator bisa tercapai dengan baik.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Cimahi sebelumnya berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 yang menjadi dasar target CPPD Kota Cimahi untuk tahun 2024 sebesar 52 Ton, kemudian untuk pengadaan Tahun 2025 dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 pertanggal 9 Januari 2025 target berubah menjadi 64,43 Ton. CPPD Kota Cimahi (beras) yang sudah ada di Gudang Bulog sebesar 50,26 ton, kurang 14,17 ton dari target Bapanas. Semula pengadaan CPPD beras Medium, namun izin prinsip untuk penjualan beras medium Bulog ke Dinas/Instansi dan Lembaga tidak dikeluarkan oleh Bulog Pusat, sehingga Cimahi dalam pengadaan CPPD ini merubah Beras Medium ke Beras Premium dan izin prinsip beras premium sudah keluar, hal ini menyebabkan terjadi keterlambatan Pengadaan CPPD 2025, sesuai mekanisme pengadaan dengan LPSE dan saldo CPPD bertambah sebanyak 23,71 ton.

Untuk capaian produksi perikanan, pada tahun 2025 dari hasil pendataan pembudidayaan perikanan di Kota Cimahi bisa menghasilkan 301,5 ton dari target sebesar 300 atau target bisa tercapai sebesar 100,50% yang diperoleh dari produksi budidaya pembesaran ikan lele, nila, mas, sidat dan lobster. Untuk Angka Konsumsi Ikan (AKI) berdasarkan rilis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Angka Konsumsi Ikan Kota Cimahi adalah 51,18.

Meskipun berkarakteristik perkotaan, Kota Cimahi yang memiliki luas lahan sawah sebesar 134,98 Ha dan luas lahan kering sebesar 177,3 Ha bisa menghasilkan produksi tanaman sebesar 2068 Ton, meningkat dari produksi tahun sebelumnya sebesar 1,62% dan

produksi tanaman hortikultura sebesar 9.967 Ton atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,42%.

Pangan sumber protein yang berasal dari peternakan dan perikanan juga diproduksi oleh Kota Cimahi. Produksi daging terbanyak berasal dari kelompok ruminansia, yaitu daging sapi sebesar 580 ton. Produksi telur memberikan kontribusi terhadap nilai produksi pangan hewani sebesar 39 ton yang berasal dari produksi telur ayam buras dan telur itik. Secara keseluruhan dari capaian produksi komoditas peternakan meningkat sebesar 106,4 % dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025 dari Januari s.d Desember telah terjadi kasus hewan menular yaitu Penyakit Kuku dan Mulut sebanyak 51 kasus dan Lumphy skin disease 2 kasus, Semua kasus terjadi di Kecamatan Cimahi Utara (Cipageran). Selain itu dan kasus Hewan Penular Rabies (HPR) dari gigitan anjing, kucing, monyet/kera dan musang sebanyak 3 kasus yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Cimahi tapi tidak berdampak positif terhadap korban.

4.2 Upaya Tindak Lanjut

Strategi utama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meskipun area pertanian di Kota Cimahi semakin menipis dengan maraknya alih fungsi lahan. Dinas Pangan dan Pertanian optimis bisa mempertahankan produksi pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui :
 - a) Optimalisasi pemanfaatan lahan sub optimal, lahan tidur, lahan kering maupun lahan pekarangan untuk pangan;
 - b) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
 - c) Mengembangkan *urban farming* di lahan sempit dengan berbagai bentuk, seperti kebun komunitas, berkebun di atap atau balkon rumah, budikdamber, dan lainnya.
 - d) Melakukan pengawasan penggunaan alat dan mesin pertanian yang optimal untuk mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan;

- e) Menggunakan sistem tumpang sari dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman yang diterapkan oleh petani untuk peningkatan produksi tanaman hortikultura.
 - f) Pemberian bimbingan untuk pokdakan dan bantuan sarana prasarana perikanan untuk pengembangan dan peningkatan produksi perikanan.
2. Melakukan optimalisasi pembinaan kepada peternak sehingga meningkatnya pengetahuan peternak untuk meningkatkan kualitas pakan dan manajemen pemeliharaan ternak;
 3. Mendorong pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam olahan pangan lokal;
 4. Optimalisasi penguatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota dan meningkatkan sosialisasi penyaluran bantuan pangan;
 5. Menjamin ketersediaan pangan melalui upaya stabilitas pasokan pangan, terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 6. Meningkatkan upaya pengendalian harga dan stok pangan, terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 7. Mencegah dan mengurangi terjadinya *food loss* dan *food waste* di setiap tahap rantai pasok, yaitu produksi, pasca panen, dan penyimpanan, pemrosesan, dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, serta konsumsi;
 8. Meningkatkan manajemen data pokok ketersediaan pangan, yaitu :
 - a) Pencatatan data produksi pangan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan secara rutin;
 - b) Pencatatan data perdagangan pangan untuk mengetahui tingkat kecukupan penyediaan pangan secara rutin;
 9. Melaksanakan gerakan pangan murah merata di seluruh wilayah di Kota Cimahi;
 11. Terus melaksanakan intervensi terhadap kasus stunting dan penanganan kerawanan pangan di Kota Cimahi melalui pemberian makanan tambahan berupa beras fortifit, telur dan susu.
 12. Semakin meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam upaya updating data kerawanan pangan dan penyediaan pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun keragamannya

dan demi peningkatan pencapaian indikator lainnya agar lebih optimal.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.**

Jabatan : Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, 5 November 2025

Pihak Kedua,

WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI,



TITA MARIAM, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700706 199803 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (AHH)	Skor PPH Ketersediaan (Skor/Nilai)	89,6
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial (Tingkat Kemiskinan)	Cakupan masyarakat rawan pangan yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100,00
3	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi (LPE)	Presentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian (persen)	1,4
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (IRB)	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan	79

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.306.160.624,00
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.134.990.730,00
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 1.918.059.500,00
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 278.009.900,00
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 795.257.900,00
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 215.303.200,00
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 2.100.000,00
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.299.248.400,00
9. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 9.411.700,00
10. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.548.562.700,00
Jumlah Anggaran	Rp 18.507.104.654,00

Cimahi, 5 November 2025

WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI,**

TITA MARIAM, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007061998032006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **FEBRI RATMOKO,S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM,S.Pt.,MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

TITA MARIAM S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

FEBRI RATMOKO,S.Hut
NIP. 197302161999031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Nilai
			Nilai IKM Perangkat Daerah	82,1	Nilai
			Indeks Profesionalitas ASN	80	Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.306.160.624	APBD

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,



FEBRI RATMOKO, S.Hut
NIP. 197302161999031004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MITA MUSTIKASARI, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,

MITA MUSTIKASARI, S.Pt., M.M.
NIP. 197005171999032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Program	Indikator Program	Target	Satuan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata Ketersediaan energi	2183	kcal/kap/hari
		Rata rata Ketersediaan Protein perkapita	68,2	gr/kap/hari
		Rata-rata Konsumsi energi	1964	kcal/kap/hari
		Rata rata Konsumsi Protein	57	gr/kap/hari
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	100	Persen
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	95	Persen

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.034.990.730	APBD
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 1.918.059.500	APBD
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 278.009.900	APBD

Cimahi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

PIHAK PERTAMA,



MITA MUSTIKASARI, S.Pt., M.M.
NIP. 197005171999032004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **TEJA DAHLIAWATI, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

PIHAK PERTAMA,

TEJA DAHLIAWATI, S.Sos.
NIP. 19740801 1993032001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Program	Indikator Program	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76	Persen
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	30	Persen
3.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	Persen
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	291	Ton
		Jumlah Produksi Ikan Hias	2.480.000	Ekor
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	100	Persen
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	2	Persen

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 249.999.750	APBD
2.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 215.303.200	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 2.100.000	APBD
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 398.656.200	APBD
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 9.411.700	APBD
6.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.548.562.700	APBD

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006



TEJA DAHLIAWATI, S.Sos.
NIP. 197408011993032001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **TUTUSARI,SS**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FEBRI RATMOKO,S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

FEBRI RATMOKO,S.Hut
NIP. 197302151999031004

TUTUSARI,SS
NIP. 197403311998032005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	80	orang
	Sub Kegiatan			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	55	orang
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	12	bulan
	Sub Kegiatan			
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik kantor yang disediakan	2	Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Paket
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	1	Laporan
C	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12	Bulan
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	bulan
	Sub Kegiatan			
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12	Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp. 72.568.000	APBD
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Rp. 17.340.000	APBD
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 41.624.000	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 19.335.350	APBD
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 8.400.000	APBD
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 684.340.100	APBD
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.200.000	APBD
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 91.337.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 193.855.000	APBD

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


FEBRI RATMOKO, S.Hut
 NIP. 197302161999031004


TUTUSARI, SS
 NIP. 197403311998032005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AGUS MAMIDIN PARID,SP**

Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM,S.Pt.,MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM,S.Pt.,MM
NIP. 19700706 199803 2 006

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,

AGUS MAMIDIN PARID, SP
NIP. 197005252007011019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficient Varian) Bahan Pangan Pokok	12	Laporan
	Sub Kegiatan			
1	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24	unit
B	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebutuhan pangan daerah)	100	Persen
	Sub Kegiatan			
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25,3	Ton
C	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (KK)	100	Persen
	Sub Kegiatan			
3	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Rp	179.523.700	APBD
2.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	447.557.980	APBD
3.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.868.870.800	APBD dan DIF

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,



AGUS MAMIDIN PARID, SP
NIP. 197005252007011019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DIEN ANDRIANI, SKH**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**
Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

PIHAK PERTAMA,

DIEN ANDRIANI, SKH
NIP. 19780505 20112 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	PPh Konsumsi (Skor)	90,14	Skor
	Sub Kegiatan			
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dok)	2	Dokumen
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	Laporan
B	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ke retail atau pasar (kali)	12	Kali
	Sub Kegiatan			
3	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp 177.054.000	DIF
2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 255.275.500	APBD
3.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 54.341.400	APBD

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Mutu dan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota

Rp

223.668.500

APBD

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

PIHAK PERTAMA,



DIEN ANDRIANI, SKH
NIP. 19780505 20112 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ARI SUSANTO, SP**

Jabatan : Kepala Seksi Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TEJA DAHLIAWATI, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

TEJA DAHLIAWATI, S.Sos.
NIP. 197408011993032001

PIHAK PERTAMA,

ARI SUSANTO, SP
NIP. 19710708020080101004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	
A	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan (Kelompok)	16	Kelompok
	Sub Kegiatan			
1	Pemberian pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Kelompok
2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	umlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen
B	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil	10	Unit Pengolah Ikan (UPI)
	Sub Kegiatan			
3	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	Unit usaha

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	245.000.000	DIF
2.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.999.750	APBD
3.	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Rp.	215.303.200	APBD

PIHAK KEDUA,


TEJA DAHLIAWATI, S.Sos.
 NIP. 197408011993032001

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,


ARI SUSANTO, SP
 NIP. 19710708020080101004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SITI RAKHMAH TENRISUI PAKKI, ST**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

PIHAK PERTAMA,

SITI RAKHMAH TENRISUI PAKKI, ST
NIP. 19760728 200501 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1	Kawasan
	Sub Kegiatan			
1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dok)	1	Dokumen
B	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok (kelompok)	6	Kelompok
2	Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8	unit
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	40	Unit (Pertemuan)

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp. 2.100.000	APBD
2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di kecamatan dan Desa	Rp. 101.999.500	APBD
3.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.446.563.200	APBD

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 006

PIHAK PERTAMA,



SITI RAKHMAH TENRISUI PAKKI, ST
NIP. 19760728 200501 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NIA FATMAWATI H, S.Kom.,M.A.P**

Jabatan : Perencana Ahli Muda/Koordinator Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FEBRI RATMOKO,S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


FEBRI RATMOKO, S.Hut
NIP. 197302161999031004


NIA FATMAWATI H, S.Kom.,M.A.P
NIP. 19770916 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji ASN dan P3K (kali)	14 14	Kali Kali
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Orang/bulan
A	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen
	Sub Kegiatan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan
	Sub Kegiatan			
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	Laporan

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp. 8.623.170.274	APBD
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 48.842.850	APBD
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 210.270.000	APBD

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,


FEBRI RATMOKO, S.Hut
 NIP. 197302161999031004

PIHAK PERTAMA,


NIA FATMAWATI H, S.Kom.,M.A.P
 NIP. 19770916 201101 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ENDEN ROSDIYANI,S.IP**

Jabatan : Analis Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MITA MUSTIKASARI, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

MITA MUSTIKASARI, S.Pt., M.M.
NIP. 197005171999032004

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,

ENDEN ROSDIYANI,S.IP
NIP. 19790612 201001 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficent Varian) Bahan Pangan Pokok	12	Laporan
	Sub Kegiatan			
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1	Laporan
2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Harga dan Stok Pangan	12	Dokumen
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	12	Laporan
B	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan (Kecamatan)	3	Kecamatan
	Sub Kegiatan			
4	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan (Dok)	1	Dokumen

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Rp	31.742.000	APBD
2.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rp	43.837.550	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Rp	36.081.400	APBD
4.	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp.	13.107.300	APBD

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,



MITA MUSTIKASARI, S.Pt., M.M.
NIP. 197005171999032004

PIHAK PERTAMA,



ENDEN ROSDIYANI, S.IP
NIP. 19790612 201001 2 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ERNI NURLAELAWATI,S.IP**

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FEBRI RATMOKO,S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


FEBRI RATMOKO,S.Hut
NIP. 197302161999031004


ERNI NURLAELAWATI,S.IP
NIP. 19801119 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen
	Sub Kegiatan			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan
	Sub Kegiatan			
3	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	29.017.850	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	505.008.800	APBD
3.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.	40.408.000	APBD

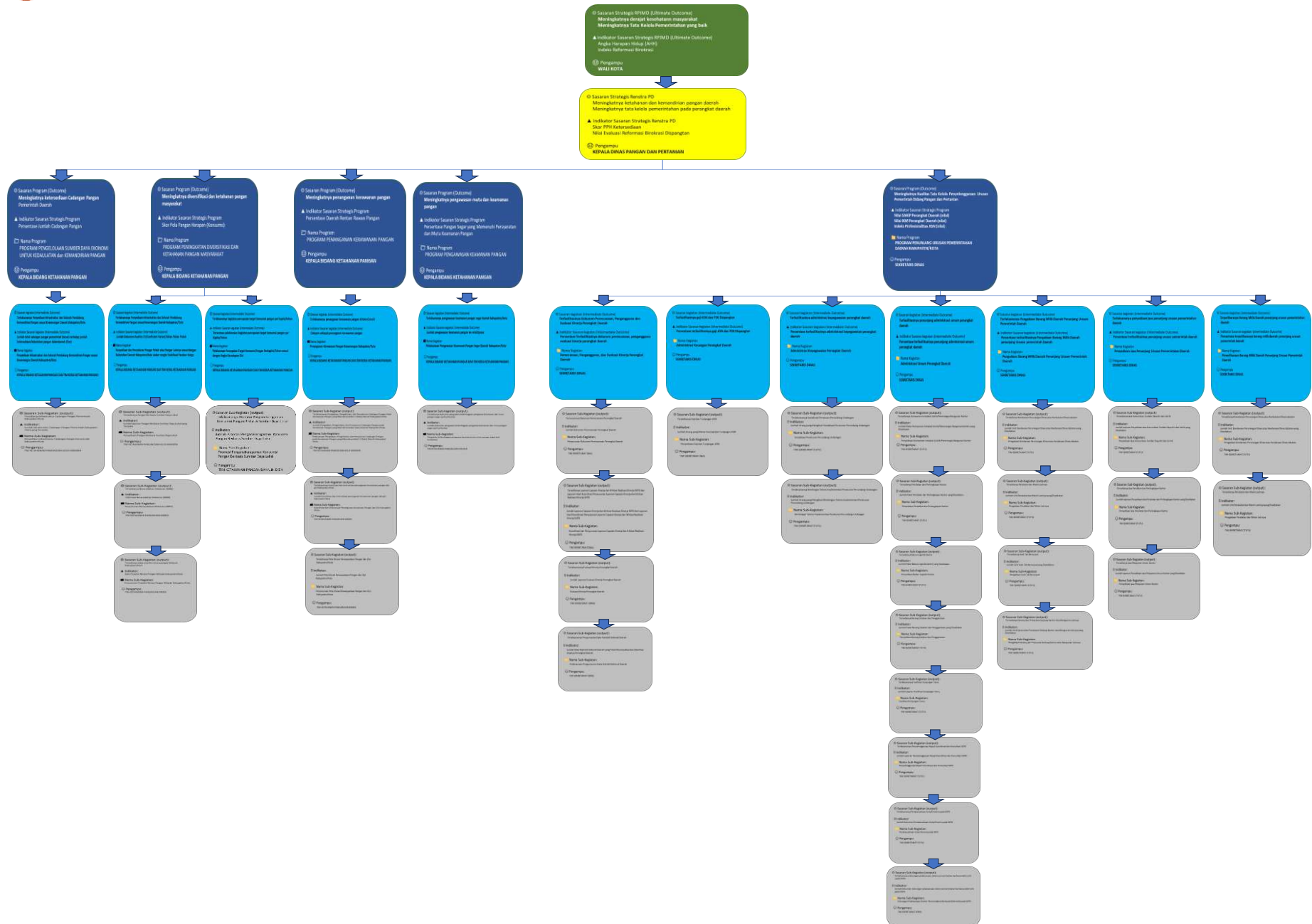
Cimahi, Oktober 2025

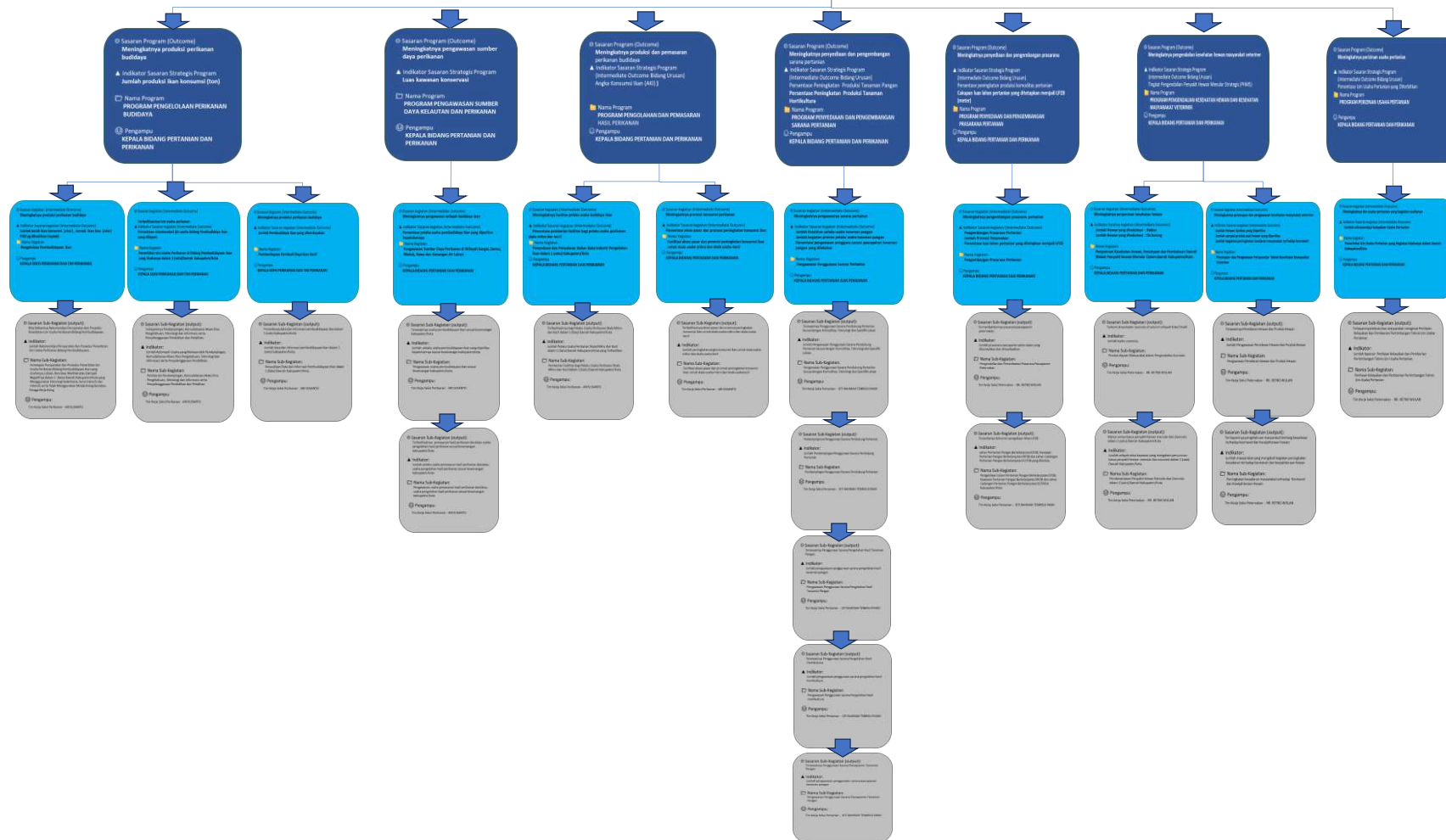
PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


FEBRI RATMOKO, S.Hut
NIP. 197302161999031004


ERNI NURLAELAWATI, S.IP
NIP. 19801119 200901 2 003



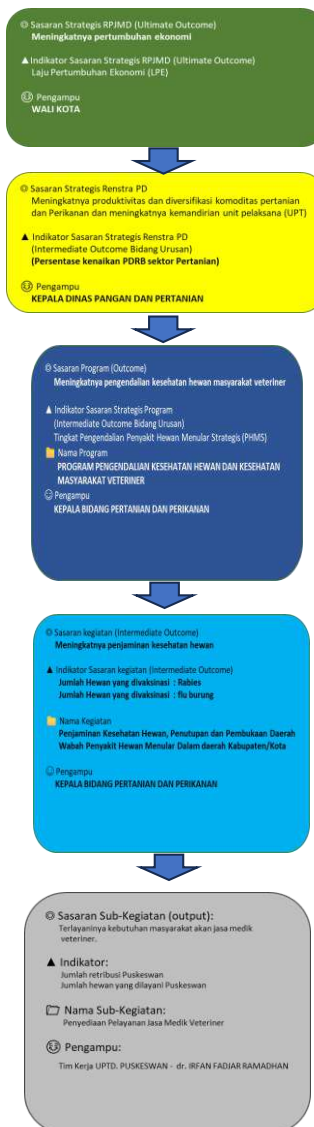




POHON KINERJA

URUSAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

(UPT. PUSKESWAN)





POHON KINERJA

URUSAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

(UPT. BBIAT)



DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAH I TAHUN 2025

		P1						P2			P3			P5 A			P5 B		P6								P7
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2025	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2030)	Realisasi 2025 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2030	Target 2030	Perbandingan Realisasi 2025 dengan target 2026	Rekomendasi Perubahan Target 2026	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	29	30	31	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
SASARAN 1		Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah																									
1	Skor PPH Ketersediaan	Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi atau kelompok pangan (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan pangan. Skor PPH dikatakan ideal apabila nilainya mencapai 100. (Bidang Ketahanan Pangan Disapangan 2025)	89,6	92,66	103,42	89,60	93,30	104,13	-0,71	-0,64	89,8	103,18	89,8	(13,62)		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Rata-rata ketersediaan Energi (kcal/Kap/hari)	2350	2183	92,89	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.134.990.730	1.032.992.470	101.998.260	91,01	8,99	
																	Rata-rata ketersediaan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	67,9	68,2	100,44							
																	Rata-rata konsumsi Energi (kcal/Kap/hari)	2100	1995	95,00							
																	Rata-rata Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	57	57	100,00							
																Tertanganinya kasus kerawanan pangan di Kota Cimahi	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	100	100,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.918.059.500	1.445.204.154	472.855.346	75,35	24,65	
																Terkendalnya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi	95	95	100,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	278.009.900	255.270.790	22.739.110	91,82	8,18	
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	Pengukuran/pe nilaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.	79	83,07	105,15	77,04	78,74	102,21	2,95	4,33	81	102,56	81	(24,15)		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,95	0	0,00	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.306.160.624	10.896.280.404	409.880.220	96,37	3,63	
																	Nilai IKM Perangkat Daerah	82,1	84,27	102,6							

			P1			P2					P3		PS A			PS B		P6									P7
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2025	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2030)	Realisasi 2025 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2030	Target 2030	Perbandingan Realisasi 2025 dengan target 2026	Rekomendasi Perubahan Target 2026	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	29	30	31	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					%			%				%					Indeks Profesionalitas ASN	80	0	0,0							
SASARAN 2	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Produktif																										
SASARAN 3	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi																										
3	Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian	Nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian di Kota Cimahi dalam suatu periode waktu tertentu. (BPS)	1,4	9,53	680,71	1,32	1,32	100,00	580,71	8,21	1,6	595,63	1,6	{679,11}		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi ikan Konsumsi (Ton)	291	301,5	103,61	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
																	Produksi ikan Hias (ekor)	2480000	2485698	100,23							795.257.900
																	Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolah perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan	2	2	100	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	215.303.200	214.927.386	375.814	99,83	0,17
																	meningkatnya luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan (%)	30	30	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.100.000	2.100.000	-	100,00	0,00
																	Terkendalnya wilayah dari penyakit zoonosis	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (jumlah Kelurahan yang diawasi)	100	100	100	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.299.248.400	1.109.478.308	189.770.092	85,39	14,61
																	Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	100	100	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	9.411.700	8.399.905	1.011.795	89,25	10,75
																		Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76	19,77	168,1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.548.562.700	1.501.922.379	46.640.321	96,99	3,01
																					Efisiensi	18.507.104.654	17.225.382.424	1.281.722.230	93,07	6,93	
																					Efisiensi Sasaran			1.207.430.858			

PRESTASI DISPANGTAN 2025



**SELAMAT KEPADA
JUARA ASN TELADAN KOTA CIMAH 2025**

1/2

JUARA 1
JABATAN STRUKTURAL
ASN TELADAN 2025
Ati Listianawati, S.Pt., M.A.P.
Kepala UPTD BBI-AT

JUARA 2
JABATAN FUNGSIONAL
ASN TELADAN 2025
drh. RR. Retno Wulan
Medik Veteriner Ahli Mud.

